

## **EVALUASI PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**Muhammad Rizky Ramadhani, Indah Murti**

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[rizky.ramadhani7g@gmail.com](mailto:rizky.ramadhani7g@gmail.com), [endah@untag-sby.ac.id](mailto:endah@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRAK**

Dalam menghadapi dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini, Pemerintah Jawa Timur memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sering kali organisasi-organisasi pemerintah mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana untuk menjalankan program-program mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi memberikan dana hibah sebagai dukungan terhadap kegiatan organisasi masyarakat. Hibah adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan tujuan tertentu yang telah ditentukan. Dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penyalur dana hibah, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan sosial berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Dalam memberikan dana hibah dan bantuan sosial, pemerintah memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, rasionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat bagi Masyarakat. Evaluasi program bantuan dana hibah yang disalurkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat mencakup analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut. Proses evaluasi ini dapat meliputi pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program, serta identifikasi keberhasilan dan tantangan yang muncul selama pelaksanaannya. Rencana Strategis memungkinkan evaluasi kinerja pemerintah secara menyeluruh dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditentukan. Selain itu, Indikator Kinerja Utama juga memungkinkan penilaian kinerja individu atau pekerjaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan peningkatan kinerja.

**Kata Kunci :** Kinerja, evaluasi, program

### **ABSTRACT**

*Given the current social dynamics and community needs, the government of East Java has an important role to play in improving the welfare of the community. However, government organizations often face difficulties in obtaining funds to carry out their programs. Therefore, the East Java Provincial Government, through the People's Welfare Bureau of the Provincial Secretariat, provides grants to support the activities of community organizations. Grants are gifts in the form of money, goods or services provided by the government or regional government with a specific purpose. From the Home Affairs Regulation No. 23/2011, it is explained that the local government not only acts as a distributor of grant funds, but also as a driver of sustainable social development in East Java Province. In providing grants and social assistance, the government pays attention to the principles of equity, compliance, rationality, transparency, accountability, and benefit to the community. The evaluation of the subsidy program provided by the East Java Provincial Government through the People's Welfare Bureau includes an analysis of the effectiveness and efficiency of the program implementation. The evaluation may include measuring the achievement of goals and objectives set in the Grant Assistance Program, as well as identifying successes and obstacles in its implementation. The strategic plan allows for the evaluation of overall government performance using predetermined performance indicators. In addition, key performance indicators can be used to evaluate individual or job performance in achieving the goals set out in the performance improvement policy.*

**Keyword :** Performance, evaluation, program

### **PENDAHULUAN**

Dalam menghadapi dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini, Pemerintah Jawa Timur memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sering kali organisasi-organisasi pemerintah mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana untuk menjalankan program-program mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Provinsi memberikan dana hibah sebagai dukungan terhadap kegiatan organisasi masyarakat. Hibah adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan tujuan tertentu yang telah ditentukan. Hibah ini bersifat tidak mengikat dan tidak diberikan secara terus-menerus. Fungsinya adalah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, memberikan dukungan spesifik, dan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah.

Tujuan dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 adalah untuk mengarahkan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial agar administrasinya dapat dilakukan dengan tertib, akuntabel, dan transparan. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat ditegakkan standar administratif yang tinggi dalam penyaluran dan pengelolaan dana bantuan sosial, menciptakan kejelasan dalam prosedur, serta memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, hibah daerah merujuk pada proses pengalihan hak dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah, atau sebaliknya. Pengalihan ini dapat dilakukan melalui perjanjian program yang didanai oleh dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang hibah. Hibah ini mencakup pemberian berupa barang, uang, atau jasa oleh pemerintah provinsi kepada berbagai entitas, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, instansi, dan lembaga kemasyarakatan yang merupakan badan hukum Indonesia. Hibah tersebut ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi.

Evaluasi program bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat melibatkan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi implementasi program tersebut. Evaluasi tersebut dapat mencakup pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program bantuan dana hibah, serta identifikasi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaannya. Dengan berjalannya program bantuan dana hibah, evaluasi dapat dilakukan terhadap kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat secara keseluruhan dalam membantu pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menyalurkan program bantuan dana hibah.

Hasil evaluasi dari berjalannya penyaluran bantuan dana hibah Akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pencapaian kinerja dan efektivitas kerja Biro Kesejahteraan Rakyat. Dari hasil evaluasi ini, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat secara lebih efektif di masa depan. Selain itu, evaluasi juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta tujuan yang lebih spesifik dalam konteks pemerintahan.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian di Biro Kesejahteraan Rakyat ini ialah evaluasi program bantuan dana hibah. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu program atau kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi dari suatu program, serta untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun indikator dalam evaluasi ialah 1) Efektivitas, yang dimana pelayanan biro kesejahteraan rakyat harus mudah diakses. 2). Efisiensi, mengoptimalkan dan mempercepat proses pencairan dana hibah. 3) Kecukupan yang dimana para pegawai atau staff membantu proses pencairan dana hibah hingga selesai. 4) pemerataan, Kemampuan sarana dan prasarana fisik Biro Kesejahteraan Rakyat adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat. 5) Responsivitas, merasa puas atas kebutuhan individual

para lembaga yang mendapatkan bantuan dana hibah. 6) Ketepatan, Para pegawai atau staff melakukan ketepatannya dalam melakukan pelayanan terhadap para lembaga penerima dana hibah.

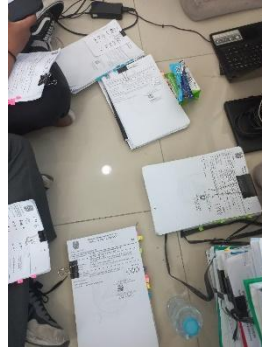
Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian di Biro Kesejahteraan Rakyat adalah mengenai kurangnya partisipasi Lembaga penerima bantuan hibah dalam kepengurusan dokumen administrasi pencairan dana hibah, sehingga menyebabkan kita harus membantu melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencairan dana hibah.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan Administrasi dalam proses pencairan dana hibah oleh Biro Kesejahteraan Raykat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggunakan standar hukum sebagai pedoman salah satunya adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur No.7 Tahun 2024 tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Tujuan dari penyampaian dana hibah adalah untuk mendukung capaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urgensi dan pentingnya daerah dalam mensupport fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penyalur dana hibah, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan sosial berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Dalam memberikan dana hibah dan bantuan sosial, pemerintah memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, rasionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat bagi masyarakat. Hibah dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang, atau jasa, dan dapat dialokasikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD), lembaga, serta organisasi masyarakat lainnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dengan pemberian hibah ini, pemerintah daerah berupaya mendukung berbagai sektor dan entitas untuk mencapai tujuan mereka. Pemberian hibah bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran program kegiatan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan yang mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota menetapkan dana hibah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pedoman secara rinci mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Natalia, T. E.:2023).

Berdasarkan hasil lapangan selama melaksanakan kegiatan magang Biro Kesejahteraan Raykat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, penulis ditugaskan untuk mengecek dokumen proposal para lembaga-lembaga yang mengajukan dana hibah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat, hal ini dikarenakan masih banyaknya lembaga-lembaga yang tidak melengkapi dokumen untuk proses pengajuan dana hibah dan menyebabkan Biro Kesejahteraan Rakyat menjadi kesusahan dalam proses pengajuan dana hibah yang menjadikan lamanya proses pengajuan dana hibah. Para lembaga susah melengkapi dokumen pengajuan dana hibah disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bagaimana dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk melengkapi.

Dalam melengkapi kelengkapan dokumen pengajuan dana hibah, penulis melakukan scan dokumen yang belum dilengkapi para lembaga untuk pengajuan dana hibah. Dokumen yang harus dilengkapi para lembaga dalam pengajuan dana hibah yaitu surat permohonan dana hibah, susunan pengurus lembaga atau organisasi, legalitas lembaga, surat keterangan domisili dan rencana anggaran biaya usulan.



Setelah melakukan scan dokumen pengajuan hibah, penulis mengupload dokumen pengajuan dana hibah melalui web yang sudah disediakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu <https://ro-kesra.jatimprov.go.id/>. Biro Kesejahteraan Rakyat memberi kemudahan terhadap para lembaga untuk melengkapi dokumennya melalui web yang sudah disediakan.

Dampak positif bagi para Lembaga penerima bantuan dana hibah ialah membantu mereka memudahkan dalam melengkapi dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah. Dengan demikian, Kinerja dalam penerapan good governance memberikan dasar yang kokoh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi pemborosan sumber daya, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil evaluasi ini berfungsi sebagai landasan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan bantuan dana hibah, serta untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pencairan dana hibah.



Dalam Pelaksanaan pencairan dana hibah terdapat berbagai permasalahan yang terjadi yang menyebabkan terkendalanya proses pencairan dana hibah. Para pegawai atau staff Biro Kesejahteraan Rakyat selaku pegawai yang membantu pemerintah daerah dalam menyalurkan pemberian bantuan dana hibah ikut serta juga memberi arahan dan membantu para Lembaga yang mengalami kesulitan dalam melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah.

Dalam efektivitas berkenaan dengan bagaimana sesuatu yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kehandalan para staff di Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan pelayanan sangat membantu para lembaga dalam proses pengajuan dan pencairan dana hibah. dalam melaksanakan tugas pelayanan. Biro Kesejahteraan Rakyat sudah menerapkan keefektifitasannya, penilaian kualitas pelayanan publik yang sudah berjalan sesuai harapan. Dalam hal ini kecermatan para pegawai dalam

melayani sudah memiliki SOP yang jelas. Selain itu Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang di Biro Kesejahteraan Rakyat, ketanggapan para pegawai dalam melayani suda cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pegawai membantu dan menanggapi setiap para lembaga dengan cepat dan tepat. Ketepatan para pegawai ini dilihat dengan merespon masalah yang terjadi dalam pembuatan atau pengurusan dokumen kependudukan. Lembaga juga dimudahkan dengan mengurus dokumen melalui web Biro Kesejahteraan Rakyat. Tidak hanya itu, ketanggapan pegawai dalam kepengurusan dokumen ini juga dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, selain itu agar para lembaga lebih mudah untuk melengkapi dokumen pengajuan dana hibah. Maka dari itu kepengurusan dokumen pengajuan dana hibah lebih efisien.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Evaluasi program bantuan dana hibah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memahami dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Langkah pembenahan telah dilakukan untuk mempermudah lembaga-lembaga penerima bantuan dana hibah dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan mempercepat proses pencairan dana hibah tersebut. Evaluasi ini mencakup pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran serta identifikasi keberhasilan dan kendala-kendala dalam implementasinya. Dalam Pelaksanaan pencairan dana hibah terdapat berbagai permasalahan yang terjadi yang menyebabkan terkendalanya proses pencairan dana hibah. Pelayanan yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dijalankan untuk membantu para lembaga yang mengajukan dana hibah mempermudah proses dalam pencairan dana hibah. Masyarakat dapat terus di dorong untuk melakukan pengajuan yang sudah di permudah oleh inovasi yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat. Dengan demikian, Pelayanan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tmur dinilai sudah cukup efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran yaitu dengan adanya para lembaga yang sering mengalami kesusahan dalam proses melengkapi dokumen , diharapkan dapat memahami apa yang sudah diberitahu oleh para pegawai. Sehingga proses pencairan dana hibah tidak terlalu lama dan para lembaga secara aktif mengikuti arahan dari pihak Biro Kesejahteraan Rakyat. Serta Para pegawai meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik kedepannya. Evaluasi pelaksanaan kegiatan magang pada di Biro Kesejahteraan Rakyat adalah mengenai kurangnya partisipasi masyarakat atau lembaga dalam kepengurusan dokumen administrasi pencairan dana hibah, sehingga menyebabkan Biro Kesejahteraan Rakyat memberikan sosialisasi untuk masyarakat atau lembaga agar bisa bekerja sama dengan baik. Dengan demikian, peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat dicapai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Endiastuti, Y. (2021). *Implementasi Program Dana Hibah Pemprov Jatim Di Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2019*. repository.unik-kediri.ac.id. <http://repository.unik-kediri.ac.id/id/eprint/314>
- Hardiyanto, O. :, Ahli, P., Kantor, M., Kementerian, W., & Jambi, A. P. (n.d.). *Manfaat Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Terhadap Peningkatan Kinerja Penganggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi*.
- Nurdihansyah, M. R. A., & ... (2024). Penerapan Pengelolaan Dana Hibah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. *VISA: Journal of Vision* .... <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/article/view/1671>
- Publik, P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2009). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik"*.
- Toha. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Desk Administrasi Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat. <https://ro-kesra.jatimprov.go.id/berita/2022/06/16/inovasi-pelayanan-publik-desk-administrasi-hibah-biro-kesejahteraan-rakyat>
- Tenny Yuliaty, P. (2023). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Publik, P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2009). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik"*.
- Tree Engel Natalia. (2023). Efektivitas Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat* ..., 1(6). <http://ejournal.warunayama.org/index.php/krepa/article/view/318>.